

ABSTRAK

Penelitian ini mengupas berbagai kelemahan dalam proses eksekusi jaminan atas tanah hak milik adat yang menjadi ganjalan akan kepastian hukum antara Debitor dan Kreditor. Penelitian ini juga memaparkan beberapa pandangan yang bertujuan untuk memberikan solusi atas suatu proses eksekusi jaminan atas tanah hak milik adat yang masih dalam proses peningkatan hak sebagai jaminan kredit.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat sedangkan terhadap permasalahannya dilakukan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara

Jaminan Kredit terhadap hak milik tanah adat sangat riskan dikarenakan belum adanya payung hukum yang menjadi dasar bagi Kreditor untuk menjalankan proses eksekusi jika Debitor wanprestasi, sehingga perlu ketelitian dalam proses pemberian Jaminan Kredit tersebut. Hak Milik Tanah Adat tentunya memiliki berbagai kelemahan dalam statusnya karena belum terdaftar di Kantor Pertanahan. Dengan adanya kelemahan serta belum adanya payung hukum yang jelas tersebut, maka diperlukan adanya persyaratan tambahan dari Kreditor jika ingin menerima Jaminan Kredit berupa tanah hak milik adat agar dapat terjamin kepastian hukumnya dalam proses eksekusi jaminan, salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan peningkatan status tanahnya menjadi Sertifikat Hak Milik.

Kata Kunci: Eksekusi Jaminan Tanah Hak Milik Adat

ABSTRACT

This study examines the various weaknesses in the process of execution of the guarantee of customary land rights that become obstacles to legal certainty between the Debtor and the Creditor. This study also outlines some of the views that aim to provide a solution to a process of securing execution of customary land rights which is still in the process of supersede the status to become eligible as a credit guarantee.

The research method used is qualitative descriptive analysis, namely data processing based on the results of field studies which are then combined with data obtained from literature studies, so that later accurate data is obtained while the problem is sociological juridical approaches. The sociological juridical approach, which is in dealing with the problems discussed based on the prevailing rules and then associated with the realities that occur in society. In supporting and supplementing secondary data, field research is conducted to obtain primary data. While primary data is obtained through interviews.

Credit Guarantee for customary land ownership is of course very risky, due to no legal framework that becomes the basis for the Creditor to pursue the execution process over defaulting party, therefore, need carefulness in the process of providing Credit Guarantee. Customary land rights of course having various weaknesses in its status because it has not been registered in the Land Office. Given the weakness and the absence of a clear legal framework, it is necessary to have additional requirements from Creditors to receive Credit Guarantee in the form of customary land rights to be guaranteed legal certainty in the process of execution of the guarantee, one solution that can be taken is to supersede the status to private property certificate.

Keywords: Execution of customary land rights.